LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

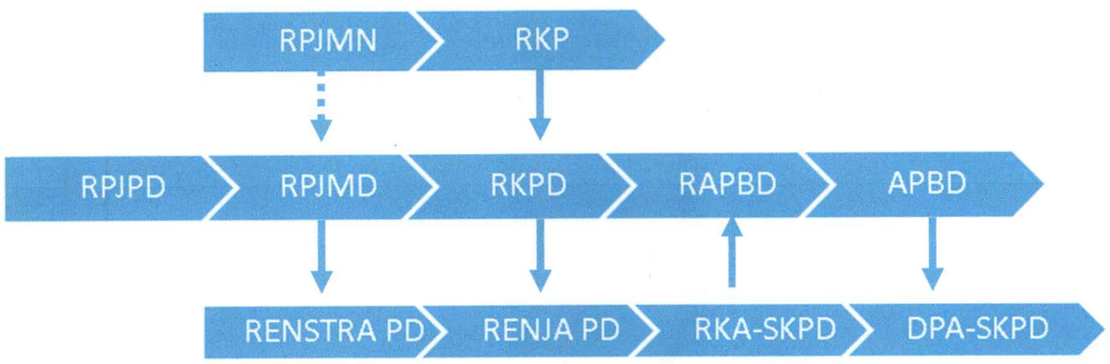
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan

Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

**Gambar 1.**

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran




Keterangan:

- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada akhirnya Rencana Kerja (Renja) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 menjabarkan rencana Program/kegiatan dan Subkegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mengacu kepada Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika**

   Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik.

**2. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

a) perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
b) pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
c) pelaksanaan kooordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
d) pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
e) pengelolaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika;
f) pengelolaan dan pengembangan e-government dan smartcity;
g) pemrosesan rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika;
h) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
i) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :

1) Sekretariat, terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
   b) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan dan Fungsional.
2) Bidang Statistik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
   a) Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik;
   b) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
3) Bidang Aplikasi Informatika dan persandian, terdiri dari :
   a) Seksi Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan informasi;
   b) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 berdasarkan

hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2024;

b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 pada tahun ke-2 (ke-satu) periode tahun 2025; dan

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

# BAB II

# HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui capain kinerja program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/subkegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program/kegiatan/subkegiatan Renstra ; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

# TABEL 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tribulan IV Tahun 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Akhir Periode) | RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja 2023 | Realisasi Renja 2023 | Tingkat Realisasi Th 2023 (%) | | Realisasi Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| **2** | **Urusan : Wajib Bukan Pelayanan dasar** | | | | | | | | | |
| **2.16** | **Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | |
| **2.16.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **Nilai Survei Kepuasan Masyarakat** | **83** | **100%** | **78** | **78** | **100%** | **78** | **334** | **402,41%** |
| **2.16.01.2.01** | **Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang di susun** | **90 Dokumen** | **5 Dokumen** | **68 Dokumen** | **68 Dokumen** | **100%** | **5 Dokumen** | **78 Dokumen** | **86,67%** |
| 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 Dokumen | - | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 44,44% |
| 2.16.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 90 Dokumen | - | 40 Dokumen | 51 Dokumen | 128% | - | 51 Dokumen | 56,67% |
| 2.16.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 90 Dokumen | - | 25 Dokumen | 32 Dokumen | 128% | - | 32 Dokumen | 35,56% |
| 2.16.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan | 19 Laporan | 6 Laporan | 6 Laporan | 100% | 1 Laporan | 26 Laporan | 144,44% |
| **2.16.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi perangkat Daerah yang di susun** | **189 Dokumen** | **19 Dokumen** | **60 Dokumen** | **73 Dokumen** | **122%** | **2 dokumen** | **94 Dokumen** | **49,74%** |
| 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang | 26 ASN | 26 ASN | 22ASN | 85% | 22 orang/bulan | 70 orang/bulan | 291,67% |
| 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 135 Dokumen | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | 3 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 5 Laporan | 166,67% |
| 2.16.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 39 Laporan | 20 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | | 21 Laporan | 53,85% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.16.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian perangkat Daerah yang di susun** | **65 Dokumen** | **1 Dokumen** | **25 dokumen** | **22 dokumen** | **88%** | **1 Dokumen** | **24 dokumen** | **36,92%** |
| 2.16.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 24 Paket | 22 Paket | - | - | - | - | 22 Paket | 91,67% |
| 2.16.01.2.05.09 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 48 Kegiatan | 20 Orang | 22 orang | 110% | 20 Orang | 90 orang | 450,00% |
| 2.16.01.2.05.10 | Sosialisasi Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan | 1500 Orang | 6 Kegiatan | - | - | - | - | 6 Kegiatan | 0,40% |
| **2.16.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah fasilitasi bagian umum yang dilaksanakan** | **36 Laporan** | **15 Fasilitas** | **12 Fasilitasi** | **12 Fasilitasi** | **100%** | **3 Laporan** | **30 Laporan** | **83,33%** |
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 7 Komponen | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 9 paket | 900,00% |
| 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.16.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 paket | 40 Bahan | 4 paket | 1 paket | 25% | 1 Paket | 42 paket | 1050,00% |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 paket | 40621 Lembar | 2 paket | 1 paket | 50% | 1 Paket | 40623 Paket | 2031150,00% |
| 2.16.01.2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2736 Dokumen | 1440 Eksemplar | 1000 dokumen | 890 dokumen | 89% | 76 Dokumen | 2406 Dokumen | 87,94% |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 laporan | 40 Kali | 30 laporan | 29 Laporan | 97% | 7 Laporan | 76 Laporan | 126,67% |
| 2.16.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 900 dokumen | 300 Arsip | 300 dokumen | 1500 dokumen | 500% | - | 1800 Dokumen | 200,00% |
| **2.16.01.2.07** | **Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah barang milik daerah yang di adakan** | **121 Buah** | **70 Unit** | **2 Unit** | **2 Unit** | **100%** | **24 Buah** | **96 Buah** | **79,34%** |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | - | 10 buah | - | - | - | - | 10 buah | 0,00% |
| 2.16.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.16.01.2.07.06 | Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 14 buah | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 10 Unit | 26 Unit | 173,33% |
| **2.16.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **4 Jasa** | **8 Jasa** | **3 Jasa** | **3 Jasa** | **100%** | **1 Jasa** | **12 Jasa** | **300,00%** |
| 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 laporan | 4 Kali | 4 laporan | 4 Laporan | 100% | 4 Laporan | 12 Laporan | 300,00% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 2 Jasa | 12 laporan | 12 Laporan | 100% | 3 Laporan | 17 Laporan | 141,67% |
| 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 laporan | 2 Jasa | 12 laporan | 12 Laporan | 100% | 1 Laporan | 15 Laporan | 750,00% |
| **2.16.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara** | **62 Unit** | **55 Unit** | **42 unit** | **17 Unit** | **40%** | **10 Unit** | **82 Unit** | **132,26%** |
| 2.16.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 unit | 10 Unit | 10 unit | 10 unit | 100% | 10 Unit | 30 unit | 300,00% |
| 2.16.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | - | 5 Unit | 5 Unit | 100% | - | 5 Unit | 100,00% |
| 2.16.01.2.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 25 unit | 19 Unit | 25 unit | 5 Unit | 20% | 5 Unit | 29 unit | 116,00% |
| 2.16.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi/ gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 2 Gedung | 2 unit | 2 Unit | 100% | 1 Unit | 5 Unit | 250,00% |
| **2.16.02** | **Program Informasi dan Komunikasi Publik** | **Presentase jenis layanan informasi publik yang tersedia** | **-** | **100%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100%** | **0,00%** |
| | | **Presentase media diseminasi informasi publik yang tersedia** | **90** | **-** | **80%** | **100%** | **125%** | **3,59** | **104** | **115,56%** |
| **2.16.02.2.01** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/kota** | **Jumlah jenis layanan informasi publik yang tersedia** | **-** | **4 Jenis** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 Jenis** | **0,00%** |
| | | **Jumlah perangkat daerah berpredikat "informatif"** | **10** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3** | **13** | **130,00%** |
| | | **Jumlah KIM berpredikat "Aktif"** | **15 KIM** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 KIM** | **20 KIM** | **133,33%** |
| | | **Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif** | **52 OPD** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 PD** | **62 OPD** | **119,23%** |
| | | **Persentase pengadaan masyarakat yang terespon tepat waktu** | **100%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100%** | **200** | **200,00%** |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah hari siar radio Rsal yang terlaksana dengan baik | - | 360 hari | - | - | - | - | 360 hari | - |
| | | Jumlah penayangan di media cetak | - | 25 kali tayang | - | - | - | - | 25 kali tayang | - |
| | | Jumlah penayangan di media online | - | 24 kali tayang | - | - | - | - | 24 kali tayang | - |
| | | Jumlah publikasi lewat banner | - | 1250 M2 | - | - | - | - | 1250 M2 | - |
| | | Jumlah Update website per minggu | - | 7 kali seminggu | - | - | - | - | 7 kali seminggu | - |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 3 Dokumen | - | 4 Dokumen | 4 dokumen | 100% | | 4 dokumen | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah OPD yang mengisi konten PPID | - | 52 OPD | - | - | - | - | 52 OPD | - |
| | | Jumlah OPD yang terfasilitasi menangani pengaduan | - | 52 OPD | - | - | - | - | 52 OPD | - |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 3 Dokumen | - | 4 Dokumen | 4 dokumen | 100% | 1 Dokumen | 5 dokumen | 166,67% |
| 2.16.02.2.01.08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina | - | 103 KIM | - | | | - | 103 KIM | - |
| | | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 3 Dokumen | - | 3 Dokumen | 4 dokumen | 133% | - | 4 dokumen | 133,33% |
| **2.16.03** | **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** | **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **-** | **200%** | **-** |
| | | **Persentase layanan publik yang diselengarakan secara online dan terintegrasi** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **-** | **200** | **-** |
| | | **Nilai Aspek TIK** | **3,50** | **-** | **-** | **-** | **3,75** | **0,109** | **0,109** | **3,11%** |
| **2.16.03.2.01** | **Pengelolaan nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/kota** | **Nilai Tingkat Kematangan layanan jaringan Intra Pemerintah Daerah** | **4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,109** | **0** | **2,73%** |
| 2.16.03.2.01.01 | Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Lisensi Domain | - | 1 Domain | - | - | - | - | 1 Domain | - |
| | | Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 36 Dokumen | - | 1 kali | 1 kali | 100% | - | 1 kali | 2,78% |
| 2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah Daerah | Jumlah kapasitas bandwith yang tersedia | - | 1100 MBps | - | - | - | - | 1100 MBps | - |
| | | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 1 Unit | 1 Sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | 100% | 1 Unit | 3 Unit | 300,00% |
| **2.16.03.2.02** | **Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/kota** | **Jumlah aplikasi pengelolaan e-government yang tersedia** | **-** | **100%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100%** | **-** |
| | | **Tingkat Kematangan pembangunan aplikasi SPBE** | **3** | **-** | **39 Aplikasi** | **61 Aplikasi** | **197%** | **2** | **63** | **210,00%** |
| | | **Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data** | **3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** | **2** | **66,67%** |
| | | **Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK** | **3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** | **2** | **66,67%** |
| 2.16.03.2.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 1 unit | 11 Unit | 1 unit | 1 unit | 100% | 1 unit | 13 unit | 1300,00% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.03.2.02.05 | Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | - | 3 kegiatan | 2 dokumen | 1 dokumen | 50% | - | 4 dokumen | - |
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik. | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 12 Unit | 3 kegiatan | 3 aplikasi | 3 aplikasi | 100% | 1 unit | 7 unit | 58,33% |
| 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan Kota cerdas. | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 3 dokumen | 4 unit | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 1 dokumen | 7 dokumen | 233,33% |
| 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah. | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 3 dokumen | 15 orang | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | 1 dokumen | 28 dokumen | 933,33% |
| **2.20** | **Bidang Urusan : Statistik** | | | | | | | | | |
| **2.20.02** | **Program Penyelenggaraan Statistik sektoral** | **Presentase data sektoral yang tersedia dan update** | **-** | **80%** | **90%** | **90%** | **100%** | **-** | **170%** | **-** |
| | | **Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data terbuka** | **3** | **-** | **-** | **-** | **2** | **90%** | **90%** | **3000,00%** |
| **2.20.02.2.01** | **Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan** | **3 buku** | **270 dataset** | **-** | **-** | **-** | **-** | **270 dataset** | **9000,00%** |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan Diseminasi data statistik sektoral. | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 3 dokumen | 1 database | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | - | 2 dokumen | 66,67% |
| **2.21** | **Bidang Urusan : Persandian** | | | | | - | | | | |
| **2.21.02** | **Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi** | **Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah** | **89%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **8%** | **208%** | **233,71%** |
| **2.21.02.2.01** | **Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota** | **Persentase Sarpras Penyelenggaran Persandian untuk Keamanan Informasi** | **-** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **-** | **200%** | **-** |
| | | **Nilai Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE** | **3** | **-** | **1** | **1** | **100%** | **1** | **2** | **66,67%** |
| 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintah an daerah Kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 36 Laporan | 1 buah | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 3 Laporan | 5 Laporan | 13,89% |
| | | | | | | | | | | |

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

| No. | Interval Nilai | Predikat |
|---|---|---|
| 1 | ≥ 91 % | Sangat Tinggi |
| 2 | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 3 | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 4 | 51% ≤ 65% | Rendah |
| 5 | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tribulan IV Tahun 2023 hasil yang dicapai sebesar 88% dengan kreteria Tinggi. Dari Program/kegiatan dan subkegiatan Tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Analisi Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran sampai dengan tribulan IV tahun 2023

| Program Perangkat Daerah | Capaian Kinerja | Predikat |
|---|---|---|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | Tinggi |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Dinas Kominfo berupaya memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika secara baik | Target Renstra PD tercapai (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat) | Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Program Informasi dan Komunikasi Publik | 125% | Tinggi |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Berfungsinya Sumber daya manusia pengelola media komunikasi publik | Target Renstra PD tercapai yakni (untuk target Persentase media diseminasi informasi publik yang tersedia) | Mengoptimalkan media komunikasi yang tersedia |
| Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika | 100% | Tinggi |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |

| | | |
|---|---|---|
| Meningktnya keaktifan Tim Koordinasi SPBE serta SDM TIK Diskominfo | - Target Renstra PD sudah tercapai (untuk yang target Presentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo)<br>- Target renstra belum tercapai (untuk target Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi) | Mempercepat integrase aplikasi layanan publik dan mempertahankan kualitas layanan jaringan untuk PD |
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 100% | Tinggi |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Walidata secara periodik melakukan updating data | Target Renstra PD tercapai (untuk yang target Persentase Data Sektoral yang tersedia dan update) | Mengoptimalkan kinerja TIM satudata |
| Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 100 % | Tinggi |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Tersedianya hardware dan software persandian untuk keamanan informasi | Target Renstra PD tercapai (untuk target Presentase Sarpras Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan *Informasi yang tersedia*) | Meningkatkan kualitas pengelolaan hardware dan software untuk keamanan informasi |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk

Hasil Analisa Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah | Target SPM | Target IKK | Target Renstra Dinas Kominfo | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Proyeksi Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Nilai Indeks SPBE | - | - | Cukup (1,8-<2,6) | Cukup (1,8-<2,6) | Baik (2,6-<3,5) | Baik (2,6-<3,5) | Sangat Baik (3,5-<4,2) | Cukup (2,22) | Baik (2,62) | Cukup (2,14) | Cukup (2,18) | Sangat Baik (3,62) | 103% |
| 2 | Persentase Aplikasi E-Government yang terhubung dengan jaringan | - | - | 90% | 90% | 90% | - | - | 92% | 92% | 94,05% | - | - | - |
| 3 | Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik | - | - | 80% | 85% | 90% | - | - | 100% | 100% | 71% | - | - | - |
| 4 | Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 98,85% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase Perangkat Daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 98% | 100% | 100% |
| 6 | Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan informasi publik | - | - | - | - | - | 13% | 25% | - | - | - | 7% | 90% | 360% |
| 7 | Persentase OPD yang melakukan update data paling sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala | - | - | - | - | - | 60% | 80% | - | - | - | 100% | 100% | 125% |

Berdasarkan tabel 2.2.1 di atas dapat disimpulkan pencapaian target pada kondisi (2023):

1. Sasaran yang realisasinya melampaui target:
   - Persentase Perangkat Daerah berpredikat " Menuju Informatif " dalam Keterbukaan Informatif Publik (capaian 360%). Faktor yang berpengaruh:
     a. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan (Website Perangkat Daerah dan Website Desa yang digunakan untuk keterbukaan informasi publik)
     b. Tersedianya Website PPID untuk masing-masing Perangkat Daerah;
     c. Tenaga Non ASN terlatih yang bisa meliput dan menyiarkan berita Pembangunan Daerah.
   - Persentase OPD yang melakukan Update Data Paling Sedikit 80% dari Jumlah Metadata secara Berkala (capaian 125%). Faktor yang berpengaruh dalam mendukung keberhasilan tercapainya kinerja ini adalah Adanya Perpres Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia.
2. Nilai Indeks SPBE (capaian 103%).
   Faktor yang berpengaruh:
   1) Kebijakan SPBE ada perbaikan, yakni:
      a) Adanya perbaikan regulasi SPBE;
      b) Perbaikan mekanisme evaluasi regulasi SPBE
   2) Tata Kelola SPBE ada perbaikan, yakni:
      a) Peningkatan tata kelola SPBE sesuai dengan manajemen ISO 27000!;
   3) Manajemen SPBE ada perbaikan, yakni:
      a) Manajemen resiko, manajemen data, manajemen layanan SPBE;
      b) Audit TIK menyeluruh ke semua Perangkat Daerah;
      c) Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Sertifikasi Keahlian;
   4) Layanan SPBE ada perbaikan, yakni:
      a) Aplikasi Aset;
      b) Aplikasi Kepegawaian;
      c) Aplikasi Pengawasan;
      d) Aplikasi Akuntabilitas;
      e) Aplikasi JDIH;
      f) Aplikasi Data Terbuka.

Untuk Kondisi tahun 2023 dari 4 indikator sasaran terdapat 4 indikator yang mencapai target yaitu :

1. Indikator Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi Kabupaten Nganjuk dengan target 100% realisasi sebesar 100%;
2. Indikator Persentase Perangkat Daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman dengan target 100% realisasinya sebesar 100%;

3. Indikator Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan Informasi Publik dengan target 25% realisasinya sebesar 90%;
4. Indikator Persentase OPD yang melakukan Update Data Paling Sedikit 80% dari Jumlah Metadata secara Berkala realisasinya 100%.

Data capaian kinerja sebagaimana tabel 2.2.1 di atas diperoleh dari sumber:

1. Data Nilai indeks SPBE merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB terhadap semua instansi pusat dan Daerah;
2. Data Presentase aplikasi e-governmant yang terhubung dengan jaringan dan data Presentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi diperoleh dari Laporan Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian;
3. Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan informasi publik, Persentase OPD yang melakukan update data paling sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala diperoleh dari Laporan Bidang Statistik Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik;

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Utama Dinas Komuikasi dan Informatika

| No. | Indikator | Pehitungan | Kondisi kinerja pada awal periode Renstra | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | | |
| 1 | Presentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi | Jumlah layanan publik berbasis elektronik terintegrasi / Jumlah seluruh layanan publik berbasis elektronik X 100% | 98,85% | 100% | 100% |
| 2 | Presentase Perangkat Daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman | Jumlah Perangkat daerah terlayani infrastruktur jaringan yang aman dan handal / Jumlah seluruh Perangkat Daerah X 100% | 98% | 100% | 100% |
| 3 | Presentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan Informasi Publik | Jumlah Perangkat berkatagori menuju informatif dalam keterbukaan informasi publik / Jumlah seluruh Perangkat Daerah X 100% | 90% | 25% | 90% |
| 4 | Presentase OPD yang melakukan update data paling sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala | Jumlah Perangkat Daerah yang telah mengisi data statistik sektoral / Jumlah seluruh Perangkat Daerah X 100% | 100% | 80% | 100% |

**Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja:**

1) Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi berkriteria "**Tercapai**" dari target 100% realisasi 100% dan diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Beberapa penyebab keberhasilan kinerja ini adalah:
   - Komitmen Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Nganjuk untuk ikut mendukung pencapaian

target RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023 yaitu pencapaian indeks SPBE Kabupaten Nganjuk serta adanya upaya perbaikan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Nganjuk berbasis TIK.

- Peningkatan kapasitas warehouse data untuk menampung layanan hosting bagi seluruh OPD di Kabupaten Nganjuk. Peningkatan kapasitas ini dengan melakukan pengadaan server baik server yang diletakkan di Data Center Kabupaten Nganjuk maupun pengadaan Server DRC yang akan dimanfaatkan untuk Backup Data. Pengadaan server dilakukan dengan e-purchasing. Jumlah server yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2023 sebesar 19 unit.
- Integrasi Aplikasi
- Pemeliharaan Aplikasi
- Pembuatan Aplikasi atau Software
- Aplikasi yang dikembankan dan disempurnakan pada tahun 2023 ini adalah: Sedudo (sedudo.nganjukkab.go.id), Portal Informasi (nganjukkab.go.id), CCTV Online (cctv.nganjukkab.go.id), Aplikasi Android Nganjuk Smart City, Aplikasi Berantas Kemiskinan dan Stunting (SIDA BERKAT)

2) Presentase Perangkat Daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman berkriteria "**Tercapai**" dari target 100% realisasi 100% dan diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Adapun faktor pendukung tercapainya kinerja ini yaitu:
   - Pelayanan bandwith bagi seluruh Pemerintah Kabupaten Nganjuk tersentral di Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan kapasitas saat ini mencapai 17120 mbps.
   - Tersedianya sarana prasarana keamanan informasi.

3) Presentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan Informasi Publik berkriteria "Tercapai" dari target 25% realisasi 90% dan diperoleh capaian kinerja sebesar 360%. Dari realisasi tersebut faktor pendukung tercapainya kinerja ini:
   - Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan (Website Perangkat Daerah dan Website Desa yang digunakan untuk keterbukaan informasi publik)
   - Tersedianya Website PPID untuk masing-masing Perangkat Daerah;
   - Tenaga Non ASN terlatih yang bisa meliput dan menyiarkan berita Pembangunan Daerah.

4) Presentase OPD yang melakukan update data paling sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala berkriteria "Tercapai" dari target 52 Perangkat Daerah realisasi Perangkat Daerah 52 sehingga di peroleh capaian kinerja 125%. Salah satu faktor pendukung keberhasilan tercapainya kinerja ini adalah Adanya Perpres Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia.

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk

Permasalahan bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian sebagaimana tabel 2.3.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**

Permasalahan bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian

| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| Lambatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik<br><br>Data dukung:<br>b. Capaian Indeks SPBE<br>- **2023 3,62**<br>- **2022 2,18**<br>- **2021 2,14**<br>- **2020 2,62**<br>- **2019 2,22**<br><br>c. Capaian Indeks KAMI<br>- **2021 415**<br>- **2022 446**<br>- **2023 464** | 1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK<br>Data dukung:<br>- Persentase OPD terlayani jaringan fiber optik internet dedicated pada **2023: 100%**<br>- Masih adanya daerah blank spot di Kabupaten Nganjuk<br>2. Terbatasnya jumlah dan mutu SDM TIK<br>Data dukung:<br>- Jumlah ASN Nganjuk kualifikasi TIK **2023 : 43 orang**<br>3. Dukungan kebijakan belum optimal<br>- Perda SPBE: belum tersedia<br>- Perda Keterbukaan Informasi Publik: **belum tersedia** | 1. Penyediaan jaringan internet belum terintegrasi di Diskominfo<br>Data dukung:<br>- Anggaran internet pada 52 OPD R-APBD **2023: Rp. 5,3 Milyar**<br>2. Minimnya peluang pendidikan pelatihan TIK bagi ASN<br>Data dukung:<br>- Anggaran diklat TIK APBD **2023: belum tersedia**<br>3. Belum optimalnya pengelolaan data daerah<br>Data dukung:<br>- Tingkat kematangan kebijakan manajemen data 2023: **4 (dari optimal 5)**<br>- Tingkat kematangan penerapan manajemen data 2023: **4 (dari optimal 5)**<br>- Tingkat kematangan layanan data terbuka 2023: **2 (dari optimal 5)**<br>4. Masyarakat belum dapat mengakses informasi publik secara optimal<br>Data dukung:<br>- Predikat Keterbukaan Informasi Publik Kab. Nganjuk **2023: Informatif**<br>5. Penerapan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya optimal<br>Data dukung:<br>- Skor RB **2022: 72,04** |

**Identifikasi Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika**

1. Tingginya kebutuhan infrastruktur, sumber daya manusia, dan layanan TIK dalam menunjang kehidupan sosial ekonomi;
2. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi pemerintahan;
3. Kebutuhan yang tinggi atas data yang lengkap, valid dan mutakhir;
4. Menguatnya kebutuhan masyarakat terhadap keamanan informasi

## A. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;
2. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Pesatnya perkembangan TIK;
4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;
5. Terbatasnya kualitas SDM dan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK.

Peluang :

1. Tersedianya peraturan perundangan-undangan yang mendasari regulasi bidang komunikasi dan informatika;
2. Kepedulian dan dukungan pimpinan terhadap bidang komonikasi dan informatika;
3. Dukungan pemerintah dan KPK untuk mendorong implementasi e-government untuk mewujudkan good governance;
4. Adanya perjanjian kerja sama antar daerah untuk implementasi dan pengembangan e-government;
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi dan informasi;
6. Adanya bantuan dari Kemenkominfo untuk menyusun roadmap smartcity Kabupaten Nganjuk.

**B. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.**

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Optimalisasi Pelaksanaan e-Govermant di Kabupaten Nganjuk;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui : pengelolaan media center dan diadakannya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan informasi sekaligus sebagai *publik relation* diwilayahnya;
4. Pengelolaan website Pemkab Nganjuk;
5. Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID;
6. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media online, media cetak dan media luar ruang;
7. Melaksanakan layanan pengaduan publik melalui Wadul Bupati dan Lapor SP4N;
8. Penyusunan Data Statistik yang lebih akurat dan tepat waktu;
9. Pengamanan informasi pemerintah daerah yang lebih baik.

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Proses review rancangan awal Renja Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal Renja Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Karena dokumen ini masih rancangan awal maka belum bisa direview.

# Tabel 2.4.1
## Review rancangan awal 2025

| Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | **Nilai Survei Kepuasan masyarakat** | **Diskominfo** | **82** | **6.517.313.942** | **Diskominfo** | **82** | **4.243.026.937** | |
| | | **Nilai AKIP Perangkat Daerah** | **Diskominfo** | **86** | | **Diskominfo** | **86** | | |
| **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | **Diskominfo** | **69 Dok** | **34.000.000** | **Diskominfo** | **69 Dok** | **75.390.000** | |
| a) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Diskominfo | 4 Dok | 10.000.000 | Diskominfo | 4 Dok | 20.000.000 | |
| b) | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Diskominfo | 30 Dok | 10.000.000 | Diskominfo | 30 Dok | 15.000.000 | |
| c) | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Diskominfo | 30 Dok | 10.000.000 | Diskominfo | 30 Dok | 9.990.000 | |
| d) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi *Kinerja SKPD dan Laporan* Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Diskominfo | 6 Laporan | 4.000.000 | Diskominfo | 6 Laporan | 30.400.000 | |
| **Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Jumlah Dokumen Administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun** | **Diskominfo** | **63 Dok** | **3.523.500.000** | **Diskominfo** | **63 Dok** | **2.755.996.967** | |
| a) | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Diskominfo | 22 ASN | 3.500.000.000 | Diskominfo | 22 ASN | 2.716.014.967 | |
| b) | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Diskominfo | 45 Dok | 15.000.000 | Diskominfo | 45 Dok | 20.000.000 | |
| c) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan *Keuangan Akhir Tahun* SKPD | Diskominfo | 1 Lap | 5.000.000 | Diskominfo | 1 Lap | 9.997.000 | |
| d) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Diskominfo | 13 Lap | 3.500.000 | Diskominfo | 13 Lap | 9.985.000 | |
| **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun** | **Diskominfo** | **25 Dok** | **509.000.000** | | **25 Dok** | **9.000.000** | |
| a) | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Diskominfo | 20 Orang | 9.000.000 | Diskominfo | 20 Orang | 9.000.000 | |
| b) | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Diskominfo | 0 | 0 | Diskominfo | 0 | 0 | |
| c) | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Diskominfo | 500 Orang | 500.000.000 | Diskominfo | 500 Orang | 0 | |
| **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan** | **Diskominfo** | **12 laporan** | **428.813.942** | | **12 laporan** | **431.458.470** | |
| a) | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Diskominfo | 1 Paket | 6.000.000 | Diskominfo | 1 Paket | 9.999.500 | |
| b) | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Diskominfo | 1 Paket | 50.000.000 | Diskominfo | 1 Paket | 48.577.430 | |
| c) | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Diskominfo | 0 | 0 | Diskominfo | 0 | 0 | |
| d) | *Sub Kegiatan Penyediaan* Bahan Logistik Kantor | *Jumlah Paket Bahan Logistik* Kantor yang Disediakan | Diskominfo | 4 Paket | 91.413.942 | Diskominfo | 4 Paket | 91.412.300 | |
| e) | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Diskominfo | 2 paket | 16.200.000 | Diskominfo | 2 paket | 16.199.340 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f) | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Diskominfo | 912 dok | 8.000.000 | Diskominfo | 912 dok | 8.000.000 | |
| g) | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Diskominfo | 30 Lap | 250.000.000 | Diskominfo | 30 Lap | 250.071.000 | |
| h) | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Diskominfo | 300 dok | 7.200.000 | Diskominfo | 300 dok | 7.198.900 | |
| **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan** | **Diskominfo** | **26 buah** | **1.195.000.000** | | **26 buah** | **208.680.000** | |
| a) | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang Disediakan | Diskominfo | 2 unit | 1.000.000.000 | Diskominfo | - | 0 | |
| b) | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Diskominfo | 15 unit | 195.000.000 | Diskominfo | 15 unit | 208.680.000 | |
| **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia** | **Diskominfo** | **4 jasa** | **532.000.000** | | **4 jasa** | **455.514.350** | |
| a) | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Diskominfo | 4 Laporan | 2.000.000 | Diskominfo | 4 Laporan | 2.000.000 | |
| b) | Sub Kegiatan Penyediaan *Jasa Komunikasi, Sumber* Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | *Diskominfo* | *12 Laporan* | *450.000.000* | *Diskominfo* | *12 Laporan* | 373.500.000 | |
| c) | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Diskominfo | 12 laporan | 80.000.000 | Diskominfo | 12 laporan | 80.014.350 | |
| **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara** | **Diskominfo** | **42 unit** | **295.000.000** | | **42 unit** | **306.987.150** | |
| a) | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Diskominfo | 10 unit | 180.000.000 | Diskominfo | 10 unit | 183.587.550 | |
| b) | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Diskominfo | 0 | 0 | Diskominfo | 0 | 0 | |
| c) | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | Diskominfo | 25 unit | 15.000.000 | Diskominfo | 25 unit | 23.400.000 | |
| d) | Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Diskominfo | 2 Unit | 100.000.000 | Diskominfo | 2 Unit | 99.999.600 | |
| **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** | | **Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk** | **Diskominfo** | **80%** | **2.297.000.000** | | **80%** | **2.298.749.700** | |
| **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota** | | **Jumlah Perangkat Daerah Berpredikat " Informatif "** | **Diskominfo** | **5 PD** | **2.297.000.000** | **Diskominfo** | **5 PD** | **2.298.749.700** | |
| | | **Jumlah KIM berpredikat "Aktif"** | | **10 KIM** | | | **10 KIM** | | |
| | | **Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif** | | **25 PD** | | | **25 PD** | | |
| | | **Persentase pengaduan masyarakat yang terespon tepat waktu** | | **100%** | | | **100%** | | |
| a) | Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | Diskominfo | 1 Dok | 115.000.000 | Diskominfo | 10 Komunitas | 89.149.900 | |
| b) | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | Diskominfo | 1 Dok | 2.100.000.000 | Diskominfo | 30 Permohonan | 109.600.000 | |
| c) | Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | *Jumlah media komunikasi* publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | Diskominfo | 1 Dok | 82.000.000 | Diskominfo | 7 Media | 2.099.999.800 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** | | **Nilai Aspek TIK** | **Diskominfo** | **2,50** | **17.900.000.000** | | **2,50** | **19.743.758.286** | |
| **Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Tingkat Kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah** | **Diskominfo** | **3** | **50.000.000** | | **3** | **71.205.000** | |
| a) | Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | Diskominfo | 12 Dokumen | 50.000.000 | Diskominfo | 12 Dokumen | 71.205.000 | |
| **Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten** | | **Tingkat Kematangan pembangunan aplikasi SPBE** | **Diskominfo** | **3** | **17.850.000.000** | **Diskominfo** | **3** | **19.672.553.286** | |
| | | **Tingkat kematangan Layanan Pusat Data** | | **3** | | | **3** | | |
| | | **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK** | | **3** | | | **3** | | |
| a) | Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | Diskominfo | 1 Unit | 1.250.000.000 | Diskominfo | 1 dok | 1.780.576.919 | |
| b) | Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | Diskominfo | 4 Unit | 600.000.000 | Diskominfo | 2 Aplikasi | 504.800.000 | |
| c) | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Diskominfo | 1 Dok | 4.500.000.000 | Diskominfo | - | - | |
| d) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah h perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas | Diskominfo | 1 Dok | 1.500.000.000 | Diskominfo | 1 Unit | 5.836.320.912 | |
| b) | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Diskominfo | 152 titik | 10.000.000.000 | Diskominfo | 52 Perangkat Daerah | 11.550.855.455 | |
| **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral statistik sektoral** | | **Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka** | **Diskominfo** | **3** | **600.000.000** | | **3** | **1.243.125.000** | |
| **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Buku Profil Daerah yang di terbitkan** | **Diskominfo** | **1 Buku** | **600.000.000** | | **1 Buku** | **1.243.125.000** | |
| a) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Diskominfo | 1 dok | 600.000.000 | Diskominfo | 1 dok | 1.243.125.000 | |
| **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** | | **Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah** | **Diskominfo** | **88%** | **350.000.000** | | **88%** | **635.625.000** | |
| **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Nilai Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE** | **Diskominfo** | **2** | **350.000.000** | | **2** | **635.625.000** | |
| a) | Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Diskominfo | 2 laporan | 350.000.000 | Diskominfo | 12 laporan | 635.625.000 | |
| **TOTAL** | | | | | **27.664.313.942** | | | **28.164.284.923** | |

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5.1
Usulan program dan kegiatan dari masyarakat

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | N I H I L | | | | |

# BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manuasia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekomomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manuasia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumbar Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Berajgama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

Berdasar telaahan rancangan RKP 2025, Diskominfo Kabupaten Nganjuk mengimplementasikan **Prioritas Nasional ke 2** yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekomomi Biru. **Prioritas Nasional ke 4** yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manuasia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran

Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. **Prioritas Nasional ke 6** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dan **Prioritas Nasional ke 7** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 adalah:

1. Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal;

Untuk tahun 2025 tujuan dan sasaran serta target yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

| **Tujuan** | **Sasaran** | **Indiktor Tujuan/Sasaran** | **Target** |
|---|---|---|---|
| | | | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | |
| Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik | | Nilai Indeks SPBE | 2,75 |
| | Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal | Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang | 21% |

### 3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025 serta melaksanakan Visi dan Misi Bupati maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Kerja yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagian besar di Dinas Komunikasi dan informatika serta desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Adapun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
   6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

**2. Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   1) Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
   2) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
   3) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

**3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah.
   1) Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa;

b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
   1) Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi;
   2) Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas;
   4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;

**4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

**5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan/sub kegiatan di tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk membutuhkan Anggaran sebesar Rp. 28.164.284.923,00 yang dipenuhi dari sumber Dana Alokasi Umum.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk adalah:

1) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo :
   a) Tujuan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik;
   b) Sasaran Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal;

2) Mendukung Pencapaian Target Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

   Kegiatan tahun 2025 mendukung pencapaian target SDGs yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan informatika. Target SDGs yang dimaksud adalah :
   a) Jumlah Perangkat daerah yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan target 50 Instansi.
   b) Presentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan target 100%.
   c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan target 52 PPID.
3) Mempercepat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 95 tahun 2018.
4) Melaksanakan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
5) Melaksanakan Perka BPS Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggarakan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
6) Melaksanakan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah.

Rumusan Rencana program/kegiatan/ sub kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana ***Tabel Berikut:***

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika 2025 dan perkiraan maju tahun 2026

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **28.164.284.923,00** | | | | | | | **30.807.700.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **28.164.284.923,00** | | | | | | | **30.807.700.000,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **26.285.534.923,00** | | | | | | | **29.807.700.000,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Nilai Survei Kepuasan Masyarakat*** ***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** | **83 Nilai** **91 Nilai** **83 Nilai** **91 Nilai** **83 Nilai** **91 Nilai** | | | **82 Nilai** **86 Nilai** | **4.243.026.937,00** | | | | | | **83 Nilai** **91 Nilai** **83 Nilai** **91 Nilai** **83 Nilai** **91 Nilai** | **5.454.700.000,00** | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | 90 Dok | | | 69 Dokumen | 75.390.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 69 Dok | 34.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 9 Dokumen | | | 4 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 90 Dokumen | | | 30 Dokumen | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 30 Dokumen | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | 90 Dokumen | | | 30 Dokumen | 9.990.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 30 Dokumen | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 18 Laporan | | | 6 Laporan | 30.400.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 6 Laporan | 4.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di susun* | 189 Dok | | | 63 Dokumen | 2.755.996.967,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 63 Dok | 3.879.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 24 Orang/bulan | | | 22 Orang/bulan | 2.716.014.967,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 24 Orang/bulan | 3.855.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | 135 Dokumen | | | 45 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 45 Dokumen | 15.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 3 Laporan | | | 1 Laporan | 9.997.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 1 Laporan | 5.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | 39 Laporan | | | 13 Laporan | 9.985.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 13 Laporan | 4.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun* | 65 Dok | | | 25 Dokumen | 9.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 25 Dok | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | 20 Orang | | | 20 Orang | 9.000.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 20 Orang | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan* | 36 Laporan | | | 12 Laporan | 431.458.470,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 12 Laporan | 429.200.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 9.999.500,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 1 Paket | 6.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 1 Paket | | | 1 Paket | 48.577.430,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 1 Paket | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | 4 Paket | | | 4 Paket | 91.412.300,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 4 Paket | 92.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 2 Paket | | | 2 Paket | 16.199.340,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 2 Paket | 16.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | 2736 Dokumen | | | 912 Dokumen | 8.000.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 912 Dokumen | 8.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 60 Laporan | | | 30 Laporan | 250.071.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 30 Laporan | 250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | 900 Dokumen | | | 300 Dokumen | 7.198.900,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 300 Dokumen | 7.200.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan* | 121 Buah | | | 26 Buah | 208.680.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 57 Buah | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | 15 Unit | | | 15 Unit | 208.680.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 15 Unit | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia* | 4 Jasa | | | 4 Jasa | 455.514.350,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 4 Jasa | 587.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 2.000.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 4 Laporan | 2.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 373.500.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 12 Laporan | 500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 80.014.350,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 12 Laporan | 85.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara* | 62 Unit | | | 42 Unit | 306.987.150,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 42 Unit | 315.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 10 Unit | | | 10 Unit | 183.587.550,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 10 Unit | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 25 Unit | | | 25 Unit | 23.400.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 25 Unit | 15.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 2 Unit | | | 2 Unit | 99.999.600,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Pegawai Dinas Kominfo | 2 Unit | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | ***Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk*** | **80 Nilai** | | | **80 Nilai** | **2.298.749.700,00** | | | | | | **80 Nilai** | **2.503.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah KIM berpredikat " Aktif "*<br>*Jumlah PD dengan Media Komunikasi yang aktif*<br>*Jumlah Perangkat Daerah berpredikat " Informatif "*<br>*Persentase pengaduan masyarakat yang terespon tepat waktu* | 15 KIM<br>52 PD<br>100 %<br>10 PD | | | 10 KIM<br>25 PD<br>5 PD<br>100 % | 2.298.749.700,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Masyarakat | 15 KIM<br>52 PD<br>100 %<br>10 PD | 2.503.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo* | 10 Komunitas | | | 10 Komunitas | 89.149.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Masyarakat | 10 Komunitas | 120.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan* | 30 Permohonan | | | 30 Permohonan | 109.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Masyarakat | 30 Permohonan | 83.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis* | 7 Media | | | 7 Media | 2.099.999.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Masyarakat | 7 Media | 2.300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | ***Nilai Aspek TIK*** | **2,50 Nilai** | | | **2,50 Nilai** | **19.743.758.286,00** | | | | | | **2,50 Nilai** | **21.850.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Tingkat Kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah* | 4 Nilai | | | 3 Nilai | 71.205.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk | 4 Nilai | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa* | 36 Dokumen | | | 12 Dokumen | 71.205.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Tingkat kematangan layanan pusat data*<br>*Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE*<br>*Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK* | 3 Indeks<br>3 Indeks<br>3 Indeks | | | 3 Nilai<br>3 Nilai<br>3 Nilai | 19.672.553.286,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk | 3 Indeks<br>3 Indeks<br>3 Indeks | 21.800.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0017 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah* | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 1.780.576.919,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk | 1 Dokumen | 1.500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah* | 12 Aplikasi | | | 2 Aplikasi | 504.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk | 4 Aplikasi | 800.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas* | 3 unit | | | 1 unit | 5.836.320.912,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk | 1 unit | 7.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota* | 52 Perangkat Daerah | | | 52 Perangkat Daerah | 11.550.855.455,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk | 52 Perangkat Daerah | 12.500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **1.243.125.000,00** | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | ***Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka*** | **3 Nilai** | | | **3 Nilai** | **1.243.125.000,00** | | | | | | **3 Nilai** | **700.000.000,00** | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah buku profil Daerah yang diterbitkan* | 1 Buku | | | 1 Buku | 1.243.125.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk | 1 Buku | 700.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata* | 3 Dokumen | | | 1 Dokumen | 1.243.125.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk | 1 Dokumen | 700.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **635.625.000,00** | | | | | | | **300.000.000,00** | |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | ***Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang ada pada Pemerintah Daerah*** | **88 %** | | | **88 %** | **635.625.000,00** | | | | | | **88 %** | **300.000.000,00** | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE* | 3 Nilai | | | 2 Nilai | 635.625.000,00 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk | 3 Nilai | 300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | 36 Laporan | | | 12 Laporan | 635.625.000,00 | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian | Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk | 12 Laporan | 300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **JUMLAH** | | | | | | | **28.164.284.923,00** | | | | | | | **30.807.700.000,00** | |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Perangkat Daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

| No. | Prioritas Daerah | Alokasi (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik. | 28.164.284.923 |

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

| No. | Sasaran Dinas Kominfo | Alokasi (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal | 28.164.284.923 |

# Tabel 4.3
# Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

| Kode Rekening | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Indikator Kinerja 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| **2.16.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | **Nilai Survei Kepuasan masyarakat** | **82** | **4.243.026.937** |
| | | | **Nilai AKIP Perangkat Daerah** | **86** | |
| **2.16.01.2.01** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | **69 Dok** | **75.390.000** |
| 2.16.01.2.01.0001 | a) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dok | 20.000.000 |
| 2.16.01.2.01.0002 | b) | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 30 Dok | 15.000.000 |
| 2.16.01.2.01.0003 | c) | *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen* Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 30 Dok | 9.990.000 |
| 2.16.01.2.01.0006 | d) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | 30.400.000 |
| **2.16.01.2.02** | **Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Jumlah Dokumen Administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun** | **63 Dok** | **2.755.996.967** |
| 2.16.01.2.02.0001 | a) | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 ASN | 2.716.014.967 |
| 2.16.01.2.02.0003 | b) | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 45 Dok | 20.000.000 |
| 2.16.01.2.02.0005 | c) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Lap | 9.997.000 |
| 2.16.01.2.02.0007 | d) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 Lap | 9.985.000 |
| **2.16.01.2.05** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun** | **25 Dok** | **9.000.000** |
| 2.16.01.2.05.0009 | a) | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 9.000.000 |
| | b) | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 0 | 0 |
| | c) | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 500 Orang | 0 |
| **2.16.01.2.06** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan** | **12 laporan** | **431.458.470** |
| 2.16.01.2.06.0001 | a) | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 9.999.500 |
| 2.16.01.2.06.0002 | b) | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 48.577.430 |
| | c) | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.06.0004 | d) | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 91.412.300 |
| 2.16.01.2.06.0005 | e) | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 paket | 16.199.340 |
| 2.16.01.2.06.0006 | f) | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 912 dok | 8.000.000 |
| 2.16.01.2.06.0009 | g) | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Lap | 250.071.000 |
| 2.16.01.2.06.0010 | h) | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 300 dok | 7.198.900 |
| **2.16.01.2.07** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan** | **26 buah** | **208.680.000** |
| | a) | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang Disediakan | - | 0 |
| 2.16.01.2.07.0006 | b) | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 unit | 208.680.000 |
| **2.16.01.2.08** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia** | **4 jasa** | **455.514.350** |
| 2.16.01.2.08.0001 | a) | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 2.000.000 |
| 2.16.01.2.08.0002 | b) | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 373.500.000 |
| 2.16.01.2.08.0004 | c) | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 80.014.350 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.16.01.2.09** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara** | **42 unit** | **306.987.150** |
| 2.16.01.2.09.0002 | a) | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 unit | 183.587.550 |
| | b) | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.09.0006 | c) | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 25 unit | 23.400.000 |
| 2.16.01.2.09.0009 | d) | Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 99.999.600 |
| **2.16.02** | **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** | | **Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk** | **80%** | **2.298.749.700** |
| **2.16.02.2.01** | **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota** | | **Jumlah Perangkat Daerah Berpredikat " Informatif "** | **5 PD** | **2.298.749.700** |
| | | | **Jumlah KIM berpredikat "Aktif"** | **10 KIM** | |
| | | | **Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif** | **25 PD** | |
| | | | **Persentase pengaduan masyarakat yang terespon tepat waktu** | **100%** | |
| 2.16.02.2.01.0015 | a) | Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | 10 Komunitas | 89.149.900 |
| 2.16.02.2.01.0017 | b) | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 30 Permohonan | 109.600.000 |
| 2.16.02.2.01.0021 | c) | Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 7 Media | 2.099.999.800 |
| **2.16.03** | **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** | | **Nilai Aspek TIK** | **2,50** | **19.743.758.286** |
| **2.16.03.2.01** | **Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Tingkat Kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah** | **3** | **71.205.000** |
| 2.16.03.2.01.0004 | a) | Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 12 Dokumen | 71.205.000 |
| **2.16.03.2.02** | **Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten** | | **Tingkat Kematangan pembangunan aplikasi SPBE** | **3** | **19.672.553.286** |
| | | | **Tingkat kematangan Layanan Pusat Data** | **3** | |
| | | | **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK** | **3** | |
| 2.16.03.2.02.0017 | a) | Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | 1 dok | 1.780.576.919 |
| 2.16.03.2.02.0020 | b) | Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 2 Aplikasi | 504.800.000 |
| | c) | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | - | - |
| 2.16.03.2.02.0023 | d) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah h perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas | 1 Unit | 5.836.320.912 |
| 2.16.03.2.02.0024 | b) | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 52 Perangkat Daerah | 11.550.855.455 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.20.02** | **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral statistik sektoral** | | **Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka** | **3** | **1.243.125.000** |
| **2.20.02.2.01** | **Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Buku Profil Daerah yang di terbitkan** | **1 Buku** | **1.243.125.000** |
| 2.20.02.2.01.0010 | a) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 dok | 1.243.125.000 |
| **2.21.02** | **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** | | **Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah** | **88%** | **635.625.000** |
| **2.21.02.2.01** | **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Nilai Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE** | **2** | **635.625.000** |
| 2.21.02.2.01.0003 P | a) | Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 12 laporan | 635.625.000 |
| | **TOTAL** | | | | **28.164.284.923** |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis rencana pembangunan daerah (RPD) dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
   b. Melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001